SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 206-217

STRATEGI PENGEMBANGAN DAN ISU-ISU AKTUAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Satria Taruna Oktavian[1], Gina Sonia[2], Naya Salsabila[3], Ade Siti Patimah[4], Joni[5], Raihani Fauziah[6]

[1,2,3,4,5,6]Universitas Siliwangi
2410021111048@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Inklusi Keuangan Syariah; Lembaga Keuangan Syariah.

Abstrak

Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, namun masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan keuangan konvensional, sehingga diperlukan strategi khusus melalui edukasi masyarakat, penguatan akses layanan, inovasi produk, serta pemanfaatan media digital. Selain itu, isu kontemporer terkait regulasi, kepercayaan publik, dan integrasi sistem syariah juga menjadi faktor penentu keberlanjutan industri ini. Kompleksitas standar keuangan syariah, dinamika ekonomi global, serta kebutuhan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) menuntut sinergi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri.Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti Big Data, Artificial Intelligence (AI), blockchain, dan layanan mobile banking memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, keamanan transaksi, serta memperkaya pengalaman nasabah. Teknologi juga mendukung inovasi produk baru, seperti crowdfunding syariah dan pembiayaan digital, yang dapat memperkuat kontribusi keuangan syariah terhadap sektor riil dan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan strategi berbasis literasi dan inklusi, menyelesaikan isu regulasi dan trust publik, serta memanfaatkan teknologi digital, lembaga keuangan syariah di Indonesia berpotensi tumbuh lebih kompetitif, berkelanjutan, dan berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional maupun global.

Keywords:
Islamic Financial Inclusion; Islamic Financial Institutions.

Abstract

The development of Islamic financial institutions (IFIs) in Indonesia has shown significant progress, yet it still faces several fundamental challenges. The level of Islamic financial literacy and inclusion remains relatively low compared to conventional finance, thus requiring specific strategies through public education, expanded access to services, product innovation, and the use of digital media. In addition, contemporary issues related to regulation, public trust, and the integration of the sharia system are also crucial determinants of the industry's sustainability. The complexity of sharia financial standards, global economic dynamics, and the need for the implementation of Good Corporate Governance (GCG) demand strong synergy among regulators, academics, and industry players. On the other

hand, technological advancements such as Big Data, Artificial Intelligence (AI), blockchain, and mobile banking provide great opportunities to enhance efficiency, transparency, transaction security, and customer experience. Technology also supports the innovation of new products such as Islamic crowdfunding and digital financing, which can further strengthen the contribution of Islamic finance to the real sector and sustainable development. By optimizing literacy and inclusion-based strategies, addressing regulatory and public trust issues, and leveraging digital technologies, Islamic financial institutions in Indonesia have the potential to grow more competitively, sustainably, and make a significant contribution to both the national and global economy.

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kehadirannya tidak hanya menjadi alternatif dari sistem keuangan konvensional, tetapi juga menawarkan model keuangan yang lebih berkeadilan, transparan, dan mengedepankan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan praktik non-etis lainnya. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia semakin pesat, terlebih setelah penggabungan beberapa bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 yang memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat masih relatif rendah dibandingkan dengan keuangan konvensional. Selain itu, dinamika regulasi, kompleksitas standar syariah, serta isu kepercayaan publik menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab agar industri ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga membawa peluang besar bagi LKS untuk meningkatkan layanan, memperluas jangkauan, serta memperkuat kepercayaan nasabah melalui sistem yang lebih modern, efisien, dan aman. Oleh karena itu, pembahasan mengenai strategi pengembangan berbasis literasi dan inklusi, isu-isu kontemporer seperti regulasi dan trust publik, serta peran teknologi dalam transformasi lembaga keuangan syariah menjadi sangat relevan. Ketiga aspek ini saling terkait dan akan menentukan arah masa depan keuangan syariah di Indonesia, baik dalam konteks domestik maupun global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena fokus kajian terletak pada pemahaman mendalam mengenai strategi pengembangan serta isu-isu aktual yang dihadapi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Metode ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan fenomena sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, tanpa dipengaruhi oleh angka atau data statistik semata.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap. Pertama, reduksi data, yaitu memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian dan membuang data yang kurang mendukung. Kedua, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang menjelaskan strategi pengembangan lembaga keuangan syariah serta isu-isu aktual yang dihadapi. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menyusun interpretasi dari hasil temuan lapangan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual dan rekomendasi strategi yang dapat

dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Pengembangan Berbasis Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia memang cukup pesat, apalagi setelah hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) hasil penggabungan tiga bank syariah besar. Namun, jika melihat tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah, kondisinya masih belum menggembirakan. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah baru berada di angka 39,11%, sementara tingkat inklusi keuangan syariah hanya 12,88%. Angka ini masih jauh tertinggal dari rata-rata nasional, di mana literasi keuangan umum mencapai 65,96% dan inklusi keuangan sebesar 80,17%.

Angka tersebut memberi gambaran bahwa salah satu pekerjaan rumah utama bagi lembaga keuangan syariah adalah meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap produk dan layanan berbasis syariah. Oleh karena itu, strategi pengembangan berbasis literasi dan inklusi menjadi sangat penting.

1. Upaya Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

   Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memperkuat literasi syariah. Pertama, melalui program edukasi yang dilakukan oleh regulator. OJK bersama KNEKS, misalnya, rutin melaksanakan kegiatan literasi melalui Gerakan Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (GERAK Syariah) serta program School of Syariah yang menyasar pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.

   Kedua, memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan. Contohnya program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia. Program ini membantu siswa mengenal tabungan syariah sejak dini dan melatih kebiasaan menabung dengan prinsip yang sesuai syariah.

   Ketiga, pemanfaatan media digital. Saat ini, banyak kegiatan literasi dilakukan secara online, baik melalui seminar virtual, konten media sosial, maupun aplikasi interaktif. Hal ini sejalan dengan tren masyarakat yang semakin terbiasa mengakses informasi melalui platform digital.

2. Strategi Penguatan Inklusi Keuangan Syariah

   Selain literasi, akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah juga perlu diperluas. Salah satunya dengan membuka layanan perbankan di daerah-daerah yang belum terjangkau kantor cabang. Kehadiran agen bank syariah dan layanan branchless

banking dapat menjadi solusi.

Inovasi produk juga berperan penting. Produk tabungan atau pembiayaan mikro dengan akad syariah, seperti murabahah atau qardhul hasan, dapat menjadi alternatif bagi masyarakat kecil yang membutuhkan modal usaha.

Digitalisasi layanan juga tidak kalah penting. Aplikasi seperti BSI Mobile memungkinkan nasabah mengakses berbagai produk keuangan syariah dengan mudah, mulai dari transaksi, pembukaan rekening, hingga layanan zakat dan wakaf. Bahkan, penerapan QRIS Syariah semakin mempermudah transaksi halal di berbagai sektor.

3. Tantangan yang Dihadapi

Meskipun program-program tersebut sudah berjalan, masih ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Pertama, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa layanan syariah hanya diperuntukkan bagi umat Islam, padahal sebenarnya bisa digunakan oleh semua kalangan. Kedua, produk keuangan syariah masih sering dianggap kurang inovatif dibandingkan dengan produk konvensional. Ketiga, masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai aspek teknis sekaligus memahami prinsip fikih muamalah.

4. Rekomendasi

Melihat tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh. Pertama, memperkuat kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri syariah. Kedua, mengembangkan inovasi produk syariah yang lebih kompetitif. Ketiga, meningkatkan literasi berbasis digital agar lebih menjangkau generasi muda yang menjadi pengguna potensial.

Dengan strategi yang tepat, peningkatan literasi dan inklusi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang lebih berkelanjutan serta memberi kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

B. Isu kontemporer: tantangan regulasi, trust publik, integrasi sistem syariah

Tantangan regulasi dalam konteks ekonomi global yang terus berubah, pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam Manajemen Keuangan Syariah menjadi krusial. Perubahan dalam kondisi ekonomi global seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan suku bunga, dan volatilitas pasar, mempengaruhi strategi pengelolaan keuangan. Manajemen Keuangan Syariah harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini sambil mempertahankan prinsip-prinsipnya yang konsisten. Selain itu kompleksitas peraturan dan standar keuangan syariah juga menjadi

tantangan tersendiri. Implementasi peraturan yang konsisten dan kompatibel dengan

prinsipprinsip syariah membutuhkan kerja sama antara lembaga keuangan, pemerintah, dan otoritas pengatur. Selaras dengan itu pengembangan produk dan inovasi dalam Manajemen Keuangan Syariah juga dihadapkan pada tantangan dalam memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang sambil mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat.

Dalam era globalisasi yang gejolak, tantangan ekonomi global memiliki dampak signifikan terhadap industri keuangan syariah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah volatilitas pasar keuangan global. Fluktuasi harga aset, seperti saham, obligasi, dan komoditas, dapat mempengaruhi performa portofolio investasi dalam manajemen keuangan syariah. Para praktisi dan pengambil keputusan di lembaga keuangan syariah harus dapat mengidentifikasi risiko-risiko ini dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat. Selain itu ketidakpastian ekonomi global juga menjadi tantangan yang signifikan. Peristiwa-peristiwa seperti krisis keuangan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan perubahan kebijakan moneter di negara-negara utama dapat memicu ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada pasar keuangan global secara keseluruhan. Manajemen keuangan syariah harus memperhitungkan dan menyesuaikan strateginya dalam dinamika ekonomi global untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Perubahan dalam geopolitik global juga memiliki dampak yang signifikan terhadap industri keuangan syariah. Konflik politik, sengketa perdagangan, dan ketegangan antar negara dapat memicu ketidakstabilan ekonomi dan pasar keuangan. Pentingnya pemahaman terhadap peraturan dan standar internasional ini tidak bisa diabaikan, para praktisi dan pengambil keputusan dalam industri keuangan syariah harus memahami secara mendalam tentang persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh lembagalembaga tersebut. Hal ini tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk investor, nasabah, dan otoritas pengawas.Meskipun pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan otoritas pengawas, serta implementasinya tidak selalu mudah dilakukan.

Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas dan keragaman dari peraturan dan standar tersebut. Setiap lembaga atau organisasi memiliki kerangka kerja sendiri yang mungkin memiliki perbedaan dalam penekanan atau interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah tertentu. Hal ini dapat menciptakan kesulitan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengikuti dan mematuhi berbagai peraturan dan standar yang berlaku secara konsisten.[1] Proses harmonisasi atau penyatuan standar antara lembaga-lembaga internasional juga merupakan tantangan yang signifikan. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa standar-standar keuangan syariah yang diimplementasikan benar-benar kompatibel dengan

[1] (Kelayakan Mengeluarkan Ṣukūk di bawah Undang-undang dan Peraturan Semasa di Algeria.Farid Ali al-Fijawi et al. 2020)

prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Terkadang interpretasi yang berbeda tentang prinsip-prinsip syariah dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara standar yang ada dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh umat Islam. Oleh karena itu diperlukan kajian yang mendalam dan diskusi yang inklusif antara para ahli dan praktisi keuangan syariah untuk memastikan bahwa standar-standar tersebut memenuhi persyaratan prinsip-prinsip syariah secara tepat.

Trus publik Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah yang beroprasi selaras pada berbagai ketentuan syariah Islam, khususnyayang berkaitan dengan tata cara bermuamalah yang mengacu pada keteladanan Nabi Muhammad SAW, seperti pembiayaan perdagangan yang berorientasi pada bisnis dan kegiatan investasi yang berbasis bagi hasil. Kegiatan dari lembaga keuangan syariah jauh dari praktik-praktik yang mengakibatkan adanya potensi riba. Lembaga keuangan beroprasi atas dasar kepercayaan, baik dari masyarakat kepada lembaga keuangan maupun dari lembaga keuangan kepada masyarakat. Guna menjaga kepercayaan dan keyakinan masyarakat, lembaga keuangan wajib terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi kinerja yang tercermin dari penerapan Good Corporate Governance.[2]

Lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam kesehariannya berusaha dalam menerapkan prinsi GCG yang sejalan dengan semua pengelolaan yang ada, termasuk peraturan UU (Undang- Undang). Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), maupun syariat Islam.Dalam penerapannya, lembaga keunangan syariah harus menyediakan informasi yang penting dan relevan, yang dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh para pemangku kepentingan stakeholders. Lembaga keuangan syariah harus proaktif dalam menyampaikan tidak hanya informasi yang diwajibkan oleh hukum, tetapi juga informasi penting yang dapatmemengaruhi keputusan yang diambil oleh pemegang saham, kreditur, sertasejumlah pihak lain yang terkait. Dari hal ini, lembaga keuangan syariah bisa membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan serta memastikan keberlanjutan dan integritas operasional lembaga keuangan. Selain menyampaikan informasi secara transparansi, dalam penerapannya, lembaga keuangan syariah, baik dalam kapasitasnya sebagai lembaga maupun pengendali otoritas, wajib memastikan pertanggungjawaban kinerjanya dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.[3]

Lembaga keuangan syariah harus menjamin bahwa kinerja dan operasional mereka dapat diaudit dan dievaluasi secara terbuka, serta siap untuk mengklarifikasi dan

[2] (Penerapan Prinsip Good Corporate Goverance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang,Az-Zahro & Mauliyah, 2022)
[3] (Aprilya, N. W., Amrullah, & Misbach, I. (2024). Analisis Penerapan Goood Corporate Governance Perspective Sharia Pada Bank Syariah Indonesia. El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 63.)

mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Situasi tersebut mendukung pemeliharaan kepercayaan publik sekaligus memastikanbahwa operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar industri yang tinggi.[4]

Maka dari itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan yang telah berlaku, penting dalam memastikan semua prinsip yang terkandung di dalamnya. Urgensinya yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah yang mencakup keadilan, transparansi dan tanggung jawab sosial. Dengan memperhatikan prinsip tersebut, dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor. Lembaga keuangan syariah juga dapat menarik lebih banyak partisipasi dari masyarakat.

Integritas sistem syariah dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data dari LPKAS 2022, sepanjang tahun tersebut total aset industri keuangan syariah mencapai Rp2.375,84 triliun, naik dari Rp2.050,44 triliun pada tahun 2021. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 15,87%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 13,82%. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah.[5] Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional denganmenawarkan layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etika dan kepatuhan terhadap hukum Islam (shariah compliance). Keberadaan LKS menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan sosial . Namun, Integrasi prinsip syariah dan manajemen risiko memerlukan pemahaman mendalam terhadap dua aspek yang seringkali memiliki pendekatan yang berbeda: yakni pendekatan normatif-teologis dan pendekatan teknis-ekonomis.Implementasi prinsip syariah dalam kegiatan lembaga keuangan syariah sangat diperlukan guna memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang disediakan adalah halal serta selaras dengan ajaran Islam. Upaya ini tidak hanya menggambarkan komitmen terhadap syariah, tetapi juga memperkuat pembentukan budaya kepatuhan serta pengelolaan risiko yang lebih efektif, yang pada titik tertentu akan memperkuat keyakinan masyarakat terhadap institusi tersebut**.** Kepatuhan ini adalah wujud dari pemenuhan harapan umat Islam untuk menjalankan kegiatan finansial yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, serta memperjelas perbedaan inti antara sistem keuangan syariah dan konvensional Oleh karenanya, dalam operasional

[4] (Nurhayati. (2021). Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengambilan Modal Usaha Perbankan Berbasis Syariah. Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi, 8(1), 181)

[5] (Islamologi : Jurnal Ilmiah KeagamaanVol. 1 No. 1(2024)EdisiJanuari-Juni)

perbankan syariah, prinsip syariah adalah faktor yang tidak bisa diabaikan, karena pelanggaran tersebut bisa membatalkan akad menurut perspektif hukum Islam.[6]

Peran Ekonomi Islam dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan penekanan pada keadilan sosial, memberikan landasan yang kuat untuk mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu cara utama di mana ekonomi Islam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi adalah melalui promosi investasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial yang luas.

Upaya-upaya global untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan modern mencerminkan dorongan untuk memperluas akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam di seluruh dunia. Salah satu cara utama untuk mencapai hal ini adalah melalui pengembangan produk-produk keuangan syariah yang inovatif dan beragam, seperti obligasi sukuk, reksa dana syariah, dan asuransi syariah. Produk-produk ini didesain untuk memenuhi persyaratan syariah dan memberikan alternatif yang halal bagi umat Muslim yang ingin berinvestasi atau menggunakan layanan keuangan.Selain itu, banyak negara dan lembaga keuangan telah mengadopsi regulasi yang mendukung perkembangan keuangan syariah.Langkah-langkah ini termasuk penyediaan infrastruktur hukum dan perpajakan yang memadai untuk produk-produk keuangan syariah, serta pengembangan standar-standar akuntansi syariah yang konsisten. Dengan adanya regulasi yang jelas dan konsisten, keuangan syariah dapat menarik minat investor dan pelaku pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar komunitas Muslim.Dilakukan kerjasama lintas batas antara negara-negara dan lembaga-lembaga keuangan telah menjadi salah satu cara untuk memperluas integrasi keuangan syariah. Melalui kerjasama ini, negara-negara dan lembaga-lembaga keuangan dapat saling bertukar pengetahuan dan pengalaman, mempromosikan inovasi, dan meningkatkan akses terhadap produk-produk keuangan syariah di pasar global. Ini membantu memperkuat fondasi industri keuangan syariah dan memperluas jangkauannya secara internasional.[7]

Pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat juga merupakan faktor penting dalam upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan modern.

[6] (Ardana, Y. (2019). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Mengukur. Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Prbankan Syariah, 4(1), 88.)

[7](Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Nurul. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 07(01), 134–149.)

Program-program pendidikan dan kampanye informasi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah dan manfaatnya, serta mempromosikan adopsi produk-produk keuangan syariah di kalangan konsumen dan investor. Dengan pendidikan yang lebih baik dan kesadaran yang lebih tinggi, diharapkan akan terjadi peningkatan permintaan dan penggunaan produk-produk keuangan syariah di masa depan.

C. Peran Teknologi dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan Big Data dan Kecerdasan Buatan (AI) di sektor perbankan syariah telah menjadi elemen krusial dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat akuntabilitas, serta memperbaiki pengalaman nasabah. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait implementasi kedua teknologi ini dalam bank syariah. Big Data memberikan kesempatan kepada bank syariah untuk mengumpulkan dan menganalisis sejumlah besar data dari berbagai sumber. Dengan analisis yang tepat, bank dapat mengekstrak wawasan penting tentang perilaku nasabah, preferensi produk, dan tren pasar. Informasi ini sangat berharga dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih baik, serta dalam merancang produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan memanfaatkan (AI) bank syariah dapat memperkaya pengalaman nasabah melalui layanan yang lebih responsif dan personal. Sebagai contoh, penggunaan chatbot dan asisten virtual memungkinkan pelanggan untuk dengan cepat mendapatkan informasi serta menyelesaikan transaksi. Di samping itu, aplikasi mobile banking yang didukung oleh AI dapat memberikan rekomendasi produk yang relevan sesuai dengan pola transaksi nasabah. Big Data memainkan peran krusial dalam mitigasi risiko, terutama dalam membantu bank mendeteksi pola transaksi mencurigakan yang dapat mengindikasikan potensi penipuan. Melalui analisis data secara real-time, bank syariah dapat segera mengambil langkah untuk mencegah kerugian finansial. Selain itu, integrasi teknologi blockchain dengan Big Data dan AI meningkatkan keamanan transaksi, menciptakan catatan yang tidak dapat diubah dan transparan. Teknologi ini memberikan peluang bagi bank syariah untuk berinovasi dalam pengembangan produk baru. Sebagai contoh, platform crowdfunding syariah dan layanan pembiayaan berbasis digital kini lebih mudah diakses, berkat analisis data yang mendalam tentang kebutuhan pasar. Dengan memahami kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor riil lainnya, bank-dapat merancang solusi keuangan yang lebih inklusif dan responsif.

Perkembangan informasi, terutama dalam bidang perbankan syariah, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan

keuangan. Teknologi digital, seperti internet banking dan aplikasi mobile banking, memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses informasi keuangan mereka kapan pun dan di mana pun. Keberadaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga memperkuat transparansi, karena nasabah dapat memantau transaksi mereka secara real-time. Dengan akses yang lebih mudah terhadap informasi keuangan, nasabah juga terdorong untuk lebih aktif dalam mengawasi aktivitas perbankan mereka.

Mobile Banking atau biasa disebut m-banking adalah sebuah layanan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi dan memudahkan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan. Mobile banking merupakan suatu layanan perbankan yang dapat diakses oleh nasabah menggunakan telepon seluler (handphone). Dengan adanya fasilitas mobile banking, setiap nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja menggunakan telepon seluler mereka dan selama telepon seluler yang digunakan terhubung ke jaringan internet. Dengan adanya layanan mobile banking diharapkan dapat memberikan kemudahan dan manfaat bagi para nasabah dalam melakukan akses ke bank tanpa harus datang langsung ke bank.

Melalui sistem berbasis teknologi, akses terhadap data keuangan menjadi lebih cepat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih efisien.

KESIMPULAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan potensi besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu ditangani secara strategis. Dari sisi literasi dan inklusi keuangan syariah, tingkat pemahaman masyarakat masih rendah sehingga diperlukan edukasi berkelanjutan, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, serta pemanfaatan media digital. Upaya peningkatan akses layanan, inovasi produk berbasis syariah, dan digitalisasi perbankan menjadi kunci dalam memperluas inklusi masyarakat ke dalam sistem keuangan syariah.

Di sisi lain, terdapat isu kontemporer yang harus dihadapi, seperti kompleksitas regulasi, dinamika ekonomi global, serta kebutuhan menjaga trust publik. Keberhasilan LKS bergantung pada konsistensi penerapan prinsip syariah, transparansi, dan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance). Integritas sistem syariah serta harmonisasi standar regulasi juga penting agar keuangan syariah tidak hanya dipercaya masyarakat Muslim, tetapi juga diterima secara luas di pasar global.

Selain itu, peran teknologi menjadi faktor penentu dalam mendukung transformasi LKS. Pemanfaatan Big Data, AI, blockchain, serta layanan digital banking dapat

meningkatkan efisiensi, memperkuat keamanan, memperluas akses, sekaligus memberikan pengalaman nasabah yang lebih personal. Teknologi juga memungkinkan pengembangan produk inovatif seperti crowdfunding syariah atau layanan pembiayaan digital untuk UMKM, sehingga semakin mendukung ekonomi riil dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan menggabungkan strategi penguatan literasi dan inklusi, penyelesaian tantangan regulasi serta trust publik, dan pemanfaatan teknologi modern, lembaga keuangan syariah di Indonesia berpeluang besar untuk tumbuh lebih kompetitif, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional dan global.

REFERENSI

Ardana, Yudhistira, and Stmik Pringsewu. 2019. *IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM MENGUKUR RISIKO DAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA*. Vol. 4. no. 1.

Bisnis, Jurnal Ekonomi, Dan Akuntansi, Nurul Laili, Az Zahro, Ika Mauliyah, Universitas Islam, Negeri Kiai, Haji Achmad, and Siddiq Jember. 2022. *Penerapan Prinsip Good Corporate Goverance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang*. 1 (1).

Farid Ali al-Fijawi, Mohammed, Homam Altabaa, Rusni Hassan, Habeebullah Zakariyah, and Abdullah Khalil Al-Juburi Abu Bakr Rafique Anis Ahmad Fikret Karcic Muhammad Al-Zuhayli Zafar Ishaque Ansari. 2020. *Journal of Islam in Asia EDITOR-in-CHIEF*.

Januari-Juni, Edisi, Nesa Febrianti, Tiara Nur, Oktaviani Putri, Zulfina Yanti, and Universitas Lambung Mangkurat. 2024. "Pengaruh Trend Fast Fashion Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat: Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1 (1). https://jipkm.com/index.php/islamologi.

Syariah, Kajian Ekonomi, Nurul Fadilah, Muhammad Yudha Ardiansyah, and Muhammad Firdaus. 2025a. *Jurnal At-Tamwil Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. 07: 2025. https://doi.org/10.33367//at.

2025b. *Jurnal At-Tamwil Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. 07: 2025. https://doi.org/10.33367//at.